

WOMEN PARTICIPATION IN RURAL TOURISM (A CASE STUDY IN WARLOKA PESISIR)

Gracedelia Jeannywelasny Ngasa¹⁾, Elisabet Oktaviani Hangu²⁾

^{1),2)} Politeknik eLBajo Commodus Labuan Bajo

Email: gracedeliangasa@gmail.com¹⁾, elisabetoktaviani@poltekelbajo.ac.id²⁾

***Abstract:** Women's engagement in Warloka Pesisir Village remains relatively low in decision-making, activity implementation, assessment, and as beneficiaries. Women are mostly passive in the implementation of projects in and outside of Warloka Pesisir. The problem stems from the educational background and the strong patriarchal culture. This research is descriptive qualitative, with data collected through interviews and observations. According to the research findings, women's participation in village management is only noticeable at the implementation stage of activities, and the number of women involved is limited to moms who manage Aneka Rasa SMEs. In some levels, women are not even involved.*

Keywords: *Women, Participation, Rural Tourism*

Abstrak: Partisipasi perempuan di Desa Warloka Pesisir masih sangat kecil baik dalam tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan penerima manfaat. Perempuan cenderung pasif dalam pelaksanaan program dalam maupun diluar desa Warloka Pesisir. Latar belakang pendidikan dan kuatnya budaya patriarki menjadi akar permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan desa hanya terlihat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan namun jumlah perempuan yang terlibat hanya terbatas pada ibu-ibu pengelola UMKM Aneka rasa. Sedangkan partisipasi dalam tahapan lainnya perempuan bahkan tidak terlibat.

Kata Kunci: *Perempuan, Partisipasi, Pariwisata Pesisir*

PENDAHULUAN

Kabupaten Manggarai Barat, yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenal secara luas karena keindahan alamnya yang memukau, terutama keberadaan Taman Nasional Komodo, rumah bagi spesies langka komodo yang telah menarik minat wisatawan lokal maupun internasional. Wilayah ini tidak hanya menawarkan pesona alam berupa pulau-pulau tropis, pantai berpasir putih, dan

keanekaragaman hayati laut, tetapi juga kekayaan budaya yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satu desa yang menyimpan potensi besar dalam konteks pariwisata adalah Desa Warloka Pesisir.

Desa Warloka Pesisir memiliki keunikan berupa warisan budaya yang masih terjaga, yang meliputi tradisi lokal, kuliner khas, serta seni dan kerajinan tangan yang mampu menarik minat wisatawan. Di tengah upaya untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, partisipasi perempuan di desa ini patut diperhatikan secara serius. Perempuan memainkan partisipasi signifikan, mulai dari mengelola homestay, memproduksi dan menjual makanan serta minuman tradisional, hingga mengembangkan kerajinan lokal seperti tenun ikat dan kerajinan berbasis anyaman yang khas. Partisipasi aktif perempuan dalam sektor pariwisata bukan hanya penting untuk menopang perekonomian keluarga mereka, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam melestarikan budaya dan warisan lokal yang menjadi daya tarik pariwisata itu sendiri.

Desa Warloka Pesisir merupakan daerah wisata baru yang sedang dikembangkan untuk menjadi Kampung Nelayan Modern (KALAMO) karena telah memenuhi beberapa kriteria yang ada. Pada Tahun 2024, pembangunan KALAMO dilakukan dengan dua pendekatan, satu diantaranya yaitu pendekatan sentra nelayan modern terintegrasi yang akan diterapkan pada Desa Warloka pesisir, dengan mengadopsi konsep KALAMO Samber – Binyeri, Biak.

Program Kalamo merupakan upaya pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern dilengkapi dengan sejumlah fasilitas perusahaan modern yg dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023). Program KALAMO dilengkapi sejumlah fasilitas produktivitas dan kompetensi masyarakat, termasuk pemberdayaan SDM. Kegiatan “barter” masih sangat lekat dengan kehidupan di Warloka Pesisir, bahwasannya kegiatan ini sudah jarang ditemui dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang yang sudah menggunakan uang sebagai alat jual beli. Desa ini sebagai salah satu penyangga Taman Nasional Komodo. Dalam perkembangannya menuju destinasi wisata sangat perlu mempertimbangkan keterlibatan semua kelompok

masyarakat termasuk perempuan. Konstruksi sosial yang merugikan wanita perlu dihilangkan.

Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai 'prasyarat' untuk mencapai ketahanan pangan global. Namun, sistem gender beragam dan kompleks. Sifat dan tingkat ketidaksetaraan gender serta kondisi yang diperlukan untuk memberdayakan perempuan berbeda-beda di berbagai negara, komunitas, dan wilayah. Oleh karena itu, studi tentang berbagai sistem gender sangat penting untuk menangkap variasi lintas budaya dalam kebutuhan dan kendala khusus gender guna mengatasi kesenjangan gender secara efektif (Akter et al., 2017). *Gender Analysis Pathway* atau GAP merupakan salah satu metode analisis gender yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat akses, peran, manfaat, dan kontrol yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan secara terpisah di dalam program-program pembangunan (Mandasari, 2022).

Namun, kontribusi perempuan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Warloka Pesisir tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang relevan, serta minimnya dukungan finansial dan teknologi, sering kali menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas peran mereka. Selain itu, norma-norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih subordinat dibandingkan laki-laki dapat membatasi ruang gerak mereka dalam sektor publik, termasuk di bidang pariwisata.

Latar belakang historis dan sosiokultural di Desa Warloka Pesisir juga mencerminkan dinamika peran gender yang kompleks, di mana perempuan sering kali berperan sebagai penjaga tradisi dan agen dalam transmisi budaya antar generasi. Meski demikian, dalam konteks pariwisata modern yang semakin mengglobal, partisipasi ini membutuhkan adaptasi agar perempuan dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam menghadapi persaingan dan tuntutan industri pariwisata yang terus berkembang. Hal ini termasuk dalam strategi untuk mengembangkan kemampuan manajemen, pemasaran produk lokal, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta.

Pekerja perempuan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan pada sektor pariwisata, tetapi berbagai permasalahan gender selalu menyertainya yang membatasi aktivitas kaum

perempuan di ranah publik seperti berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi yang tercermin pada kesenjangan upah dan gaji (Haslinda, 2019). Hasil penelitian lain mengungkapkan 1) perempuan dalam memiliki akses terbatas ke pariwisata di Taman Nasional Komodo, 2) tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan pariwisata sangat rendah, yaitu sebagai penjual makanan di warung, 3) keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata masih rendah, 4) laki-laki lebih diuntungkan dari keberadaan Taman Nasional Komodo dibandingkan dengan perempuan, 5) bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan adalah marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda, dan kekerasan. Penelitian ini dilakukan di daerah wisata Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mandasari, 2022). Penelitian ini dengan nyata menunjukkan bahwa perempuan di sektor pariwisata masih belum dilibatkan secara maksimal seperti laki-laki. Selain itu ketidakadilan gender masih mewarnai kehidupan wanita dalam memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Women Participation in Rural Tourism: A Case Study in Warloka Pesisir”. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan pedesaan di Desa Warloka Pesisir mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Partisipasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian masukan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kegiatan (Fajrina et al., 2024). Partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta ikut serta pula dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Pramudya et al., 2022).

Pada dasarnya partisipasi berarti ikut serta secara aktif dalam kegiatan atau keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan:

1. Keterlibatan: Orang atau kelompok berperan aktif dalam kegiatan.
2. Kesetaraan: Semua orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, tanpa memandang latar belakang.
3. Kerja Sama: Partisipasi mendorong orang untuk bekerja bersama demi hasil yang lebih baik.
4. Transparansi: Proses partisipasi harus terbuka dan jelas, sehingga semua pihak tahu apa yang terjadi dan mengapa.

Konsep Gender dan Perempuan

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum Perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada Perempuan yang telah mengakar kuat dalam Masyarakat. Budaya dan tradisi sangat berperan dalam membentuk stereotipe yang menciptakan ketergantungan Perempuan dan laki-laki cukup besar. Untuk mereposisi peran Perempuan dalam pergaulan sosial Masyarakat, maka konsep gender lain merekonstruksi hubungan laki-laki dan Perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki atau Perempuan.

Secara terminologi, Menurut (Herniti, 2013) gender merupakan peran, sikap, dan sifat perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh sosial dan budaya sehingga tidak menutup kemungkinan antara budaya yang satu dan budaya yang lainnya berbeda dalam memandang peran, sikap, dan sifat perempuan. Gender bukanlah harga mati atau kodrat illahi, tetapi akan selalu berubah menurut budaya yang melingkupinya. Dengan kata lain, gender merupakan produk sosio-kultural. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan (Rokhmansyah, 2016) gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan Perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional

antara laki-laki dan Perempuan yang berkembang dalam Masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan Perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun Perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa (Fakih, 1997). Perubahan ciri sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu disuatu tempat tertentu Perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan di tempat yang berbeda laki-laki lebih kuat. Perubahan juga bisa terjadi dari kelas ke kelas Masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, Perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal tersebut dapat dipertukarkan antara sifat Perempuan dan laki-laki dan bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pengambilan Keputusan

Perempuan memainkan peran penting sebagai buruh atau manajer dan pengambil keputusan (Aung et al., 2021). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengacu pada peran aktif perempuan dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, keluarga, komunitas, serta kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Ini melibatkan keikutsertaan perempuan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan strategis, dan memengaruhi hasil akhir dari keputusan tersebut, baik di sektor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan efisiensi teknis (Aung et al., 2021). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan diukur dengan dua variabel: (i) persentase anggota perempuan yang menghadiri rapat umum (disebut sebagai “partisipasi pasif”); dan (ii) jumlah anggota EC perempuan (disebut sebagai “partisipasi aktif”). Proksi yang terakhir

adalah ukuran kepemimpinan perempuan yang paling jelas dan tidak ambigu dalam kelompok, dan mengacu pada situasi di mana Perempuan secara formal diberkahi dengan posisi berwenang (Kahsay et al., 2021).

Mudah dibayangkan bahwa terkadang perempuan hanya dimasukkan dalam komite eksekutif kelompok untuk memenuhi persyaratan kuota, tanpa benar-benar memengaruhi keputusan kelompok. Intervensi tambahan mungkin diperlukan, mungkin termasuk kampanye informasi, pemantauan pemerintah, pelatihan kepemimpinan bagi anggota perempuan, dan dukungan bersyarat bagi kelompok tergantung pada tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun, penting untuk menekankan bahwa norma budaya menentukan sejauh mana perempuan dapat mengungkapkan pendapat mereka selama rapat, dan norma tersebut mungkin hanya berubah secara perlahan di bawah tekanan dari luar, untuk bukti norma sosial yang berubah dengan cepat dalam konteks pemberdayaan perempuan)

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya mencakup kehadiran perempuan dalam proses tersebut, tetapi juga memberi mereka ruang untuk memberikan pandangan, suara, dan kontribusi yang signifikan. Konsep ini berfokus pada hak perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di segala bidang yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk di level keluarga, komunitas, pemerintahan, dan sektor swasta. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan (Kahsay et al., 2021) kebijakan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan formal dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan distribusi keuntungan yang lebih adil dari ekstraksi (yaitu manfaat yang diperoleh anggota lain selain hanya elit).

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan Program

Partisipasi perempuan dalam tahap pelaksanaan program merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan. Peran aktif perempuan tidak hanya berkontribusi pada keadilan sosial tetapi juga meningkatkan efektivitas program melalui perspektif yang lebih beragam. Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan suatu program berarti keterlibatan aktif

perempuan dalam semua tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini sangat penting karena memberikan manfaat besar bagi efektivitas dan keberlanjutan program.

Menurut (Aung et al., 2021) kemampuan perempuan pada tahap ini diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Inisiatif kelompok perempuan untuk berdiskusi dan memberikan usulan tersebut dapat menunjang keberlanjutan kegiatan pengelolaan lahan. Sedangkan pada kegiatan pelatihan, kelompok sasaran cenderung tidak memberikan pendapat, usulan atau pun kritik karena pelatihan yang dilakukan rata-rata merupakan proses belajar mengajar sehingga cenderung memunculkan proses tanya-jawab dalam pelaksanaannya.

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Evaluasi

Partisipasi perempuan dalam tahap evaluasi merujuk pada peran aktif perempuan dalam proses penilaian dan analisis terhadap hasil-hasil dari suatu program, kebijakan, atau proyek, khususnya dalam konteks pengembangan dan pengelolaan sumber daya. Tahap evaluasi sangat penting karena menjadi penentu keberhasilan suatu inisiatif dan memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif.

Menurut (Akbar et al., 2023) perempuan dapat berpartisipasi dalam tahapan evaluasi dengan menyampaikan kritikan dan masukannya kepada aparat pemerintah desa baik melalui rapat evaluasi atau melalui ketua RT (Rukun Tetangga) setempat. Evaluasi dari kalangan perempuan sangat penting karena mereka juga merasakan dampak dari adanya pembangunan, Sehingga masukan dan kritikan yang disampaikan akan berguna demi peningkatan.

Manfaat Partisipasi Perempuan dalam Evaluasi:

1. Perspektif yang Beragam: Keterlibatan perempuan membawa sudut pandang yang berbeda dan lebih inklusif, yang membantu dalam melihat dampak kebijakan atau program dari berbagai sudut pandang.
2. Kesetaraan Gender: Partisipasi perempuan membantu memperkuat nilai kesetaraan gender, memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua pihak diperhitungkan.

3. Akses dan Pemberdayaan: Ketika perempuan terlibat dalam evaluasi, mereka dapat lebih memahami dan mengkritisi proses yang berlangsung, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pengambilan manfaat

Partisipasi perempuan pada tahap pengambilan manfaat, terutama dalam konteks pengembangan atau pengelolaan suatu program atau proyek, mengacu pada partisipasi perempuan dalam pemanfaatan hasil atau manfaat suatu kebijakan atau kegiatan. Hal ini melibatkan perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai agen aktif dalam proses penggunaan hasil tersebut.

Menurut (Kabeer, 2005) bahwasannya pentingnya melibatkan perempuan dalam tahap pengambilan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Akses perempuan terhadap pekerjaan berbayar dapat memberi mereka rasa percaya diri yang lebih besar dan daya beli yang lebih besar. Kehadiran perempuan dalam struktur tata kelola masyarakat jelas membawa potensi untuk mengubah praktik yang tidak adil, tetapi jika perempuan yang dimaksud diambil dari kalangan elit yang sempit, jika mereka diundang alih-alih dipilih, dan jika mereka tidak memiliki konstituen akar rumput untuk diwakili dan dipertanggungjawabkan, kehadiran mereka hanya akan menjadi simbolis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dikaji memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian Pustaka dan jurnal online. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juni 2024 dengan di desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Warloka Pesisir, dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling atau pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu menjawab permasalahan penelitian (Yakin, 2023). Kriteria sumber data dalam penelitian ini adalah 1) perempuan yang bekerja dalam sector

pariwisata di desa Warloka Pesisir, 2) aparat desa Warloka Pesisir, 3) pokdarwis dan Lembaga masyarakat desa, dan 4) tokoh-tokoh masyarakat di desa Warloka Pesisir. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Sumber ini dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang mana yang spesifik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada proses ini data yang dihasilkan dalam proses wawancara dicek kembali dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi (Sugiono: 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pengambilan Keputusan di Desa Warloka Pesisir

Partisipasi perempuan masih sangat minim dalam tahap pengambilan keputusan di Desa Warloka Pesisir. Hal ini disimpulkan dari wawancara peneliti dengan beberapa responden penelitian yaitu Sekretaris desa Warloka pesisir, pelaku UMKM Aneka Rasa, tokoh masyarakat, dan ketua balai perempuan Koalisi Perempuan untuk keadilan dan demokrasi Desa Warloka Pesisir. Proses pengambilan keputusan di Desa ini biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama bertempat di Balai desa. Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Warloka Pesisir bahwa beliau selalu melibatkan warga desa tanpa terkecuali untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Undangan untuk mengikuti musyawarah biasanya disampaikan melalui RT/RW setempat dan juga melalui pengumuman di Masjid. Jumlah perempuan yang biasanya ikut dalam musyawarah 1-3 orang saja. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh ibu Seripa selaku pelaku UMKM dan tokoh masyarakat bahwa dirinyalah yang sering mengikuti kegiatan desa bersama dengan beberapa rekan ibu-ibu yang mengelola UMKM bersama.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa Warloka Pesisir juga disampaikan oleh Ibu Hasira selaku kepala balai perempuan Koalisi Perempuan untuk keadilan dan demokrasi Desa Warloka Pesisir. Bahwasannya perempuan Warloka lebih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak mengikuti kegiatan musyawarah desa bahkan kegiatan lain yang membutuhkan kehadiran seluruh warga

desa. Musyawarah merupakan wadah komunikasi masyarakat untuk bisa menyampaikan permasalahan atau isu-isu yang muncul disekitarnya sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Dengan musyawarah semua pihak dengan transparan untuk mengambil suatu keputusan dan membulatkan tekad mencari jalan keluar (Hariyanto, 2015). Hasil musyawarah bisa merupakan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan bersama dengan demikian sangat diperlukan kesadaran pribadi individu untuk mengikuti kegiatan tersebut terutama dalam mencari solusi dan pengambilan keputusan. Dampak jika masyarakat pasif dan tidak mengikuti musyawarah dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat dan mengakibatkan banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan serta daftar prioritas rencana pembangunan desa yang seharusnya diusulkan dan diajukan langsung oleh masyarakat cenderung diambil alih tugasnya oleh para elit (Samad et al., 2019). Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan penyelarasan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat (Riyadi & Bratakusumah, 2004).

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan Suatu Program di Desa Warloka Pesisir

Dalam informasi yang didapatkan oleh peneliti diketahui bahwa ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan program pemerintah yang pernah dijalankan di Desa Warloka Pesisir diantaranya Bintari (program peka iklim), SUSTOUR Swisscontact Indonesia, dan pemerintah daerah melalui dinas perikanan. Kelompok nelayan terbentuk dengan arahan dinas perikanan diikuti kemudian dengan berdirinya koperasi nelayan yang khusus menyediakan kebutuhan para nelayan saat bekerja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Seripa dan Sekdes Warloka Pesisir, keterlibatan perempuan dalam program-program pengembangan desa juga masih sangat minim. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM Bintari adalah program *beach cleaning* dan penanaman bakau di pinggir Pantai. Disampaikan bahwa setiap minggu

pihak Bintari melakukan *beach cleaning* dan penanaman bakau dengan mengajak semua anggota masyarakat seperti pokdarwis, dan melalui desa/RT/RW, hanya sedikit perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ini. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perempuan yang tergabung dalam UMKM Aneka Rasa yang diketuai oleh Ibu Seripa. UMKM ini berdiri sebagai bentuk kesadaran Ibu Seripa setelah beliau mengikuti berbagai kegiatan atau program pemerintah dan sangat didukung oleh pemerintah desa Warloka Pesisir. Beliau ingin partisipasi perempuan benar-benar terlibat dalam pengelolaan pariwisata di desanya bukan menjadi penonton saja. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pak sekdes bahwa berbagai kegiatan dilakukan di desa hanya diikuti oleh laki-laki dan beberapa perempuan yang menjadi anggota UMKM Aneka Rasa. Sejauh ini masih belum ada LSM atau program khusus yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan, misalnya program yang bisa meningkatkan kapasitas perempuan.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan program masih sedikit dan belum ada kesadaran untuk terlibat secara aktif. Padahal, perempuan adalah sumber daya manusia (SDM) paling signifikan dimana kontribusi ekonomi perempuan memiliki kesetaraan status sama halnya dengan laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Indarti, 2019) bahwasannya rekayasa kultur yang terjadi di masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan yang masih belum maksimal atau setengah-setengah, masih menjadi kendala sekalipun terlihat masif atas peran perempuan dalam pembangunan. Akibat yang ditimbulkan diantaranya adalah kemiskinan ekonomi perempuan dan perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, akibatnya adalah perempuan selalu berada pada posisi yang tidak penting (Nova, 2022).

Peluang-peluang dalam menduduki peran strategis di masyarakat dan pemerintahan telah dibuat agar perempuan turut berpartisipasi namun ketika perempuan telah turut andil berpartisipasi masih banyak juga rintangan dan tantangan yang ditemukan (Indarti, 2019). Keterlibatan perempuan sejatinya menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di semua sektor. Negara tidak mungkin bisa sejahtera bila perempuan dibiarkan tertindas, tersisih dan tertinggal (Nova, 2022).

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Evaluasi di Desa Warloka Pesisir

Pada tahap evaluasi masyarakat diharapkan agar dapat menyampaikan kritikan dan masukan atas pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau proyek khususnya dalam konteks pengembangan sumber daya desa. Dalam tahapan ini sangat dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali untuk dapat memberikan kritikan dan masukan atas pelaksanaan program tersebut. Menurut sekdes Desa Warloka Pesisir ada musyawarah yang dilakukan oleh desa dalam proses pengembangan desa, misalnya musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Menurut (Firmansyah et al., 2023) secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang yakni mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kemudian, mengidentifikasi dan membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan. Adapun alur proses kegiatan musrenbang yaitu tahapan persiapan, tahapan pra musrenbang, dan tahapan pelaksanaan sehingga sampai menetapkan waktu dan tempat (Wirawan et al., 2015).

Dalam musrenbang ini pihak Desa Warloka Pesisir mengundang seluruh masyarakat melalui RT.RW untuk terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang. Faktanya adalah hanya laki-laki saja yang datang untuk mengikuti kegiatan ini sedangkan kehadiran perempuan hanya beberapa orang (2-3 orang) saja. Kecilnya keterlibatan perempuan ini disebabkan oleh sikap pasif perempuan, merasa tidak mampu, malu, dan merasa suaranya akan diabaikan, ungkap Ibu Seripa selaku pelaku UMKM dan tokoh masyarakat perempuan. Faktor latar belakang pendidikan dan budaya patriarki yang kental menjadi akar masalah kecilnya keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi.

Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pengambilan manfaat di Desa Warloka Pesisir

Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti sejak bulan Juli 2024 ada beberapa permasalahan yang cukup berdampak pada perempuan di Desa Warloka Pesisir. Aspek kesehatan seperti kekurangan tenaga medis dokter dan bidan yang bisa menangani sakit. Masyarakat harus menempu perjalanan jauh ke Labuan Bajo untuk bisa mendapatkan pengobatan yang layak sesuai kebutuhan. Desa ini memiliki puskesmas tetapi stok obat-obatan

pun terbatas dan tenaga medis kurang. Ibu hamil dan akan melahirkan harus dirujuk keluar kampung agar bisa mendapatkan penanganan yang layak. Masalah air bersih menjadi tantangan utama karena daerah ini belum dapat dialiri air PAM daerah. Sumur yang digunakan masyarakat merupakan air kapur dan sangat tergantung pada cuaca. Akses KISS dan jaminan kesejahteraan lainnya juga belum didapatkan secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya perempuan.

Aspek ekonomi, berkaitan dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa yaitu nelayan. Para nelayan baik laki-laki maupun perempuan terlibat menjadi anggota koperasi maupun kelompok nelayan sehingga akses kebutuhan menjadi lebih mudah. Namun, berdasarkan wawancara peneliti dengan sekdes dan tokoh perempuan, belum semua nelayan di desa Warloka pesisir memiliki kartu nelayan. Kartu ini digunakan untuk mendapat kepastian BBM subsidi, kemudahan mendapatkan bantuan lainnya karena data nelayan berada di database inklusi dan literasi keuangan. Kemudian, akses program pelatihan dan kursus juga belum didapatkan oleh perempuan di desa ini. Ibu Seripa menyampaikan bahwa yang cukup aktif untuk mengikuti pelatihan dan kursus didalam maupun di luar desa adalah anggota UMKM Aneka Rasa. Hal ini akhirnya membuat pengembangan SDM perempuan di Warloka Pesisir tidak berjalan sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mau terlibat dalam program apapun yang dilaksanakan didalam maupun diluar desa. Perempuan yang menerima manfaat program pelatihan hanyalah perempuan-perempuan yang memiliki inisiatif untuk terlibat, misalnya ibu-ibu UMKM Aneka rasa. Selain meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terkait UMKM, finansial dan materi juga ikut bertambah, kebutuhan ekonomi sedikit demi sedikit terpenuhi.

Penelitian terdahulu dari (Maimuna et al., 2022) menunjukkan untuk mengembangkan UMKM dalam basis khas perempuan dibutuhkan keterlibatan perempuan. Hal ini untuk pengelolaan keuangan dan menjadi pengusaha sebagai kerja sampingan. Selain itu, keterlibatan perempuan melalui UMKM juga untuk memberi kesempatan dan memberi keterampilan khusus untuk membuka dan mengembangkan peluang usaha sebagai penghasilan tetap. Dengan pengalaman yang banyak akan berdampak menambah pengetahuan baru.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerima manfaat suatu program masih sangat minim atau kecil. Tercatat bahwa keterlibatan perempuan dalam tahap pelaksanaan ada tetapi masih sedikit. Hal ini disebabkan oleh sikap pasif perempuan, merasa tidak mampu, malu, dan merasa suaranya akan diabaikan. Akar permasalahan ini mengacu pada latar belakang pendidikan perempuan di desa ini masih rendah yaitu tingkat SMP dan juga kuatnya budaya patriarki yang mendarah daging. Anggapan bahwa perempuan harus dibelakang kemudian dilanggengkan oleh laki-laki dan bahkan perempuan itu sendiri. Pemikiran ini kemudian dianut dan diwariskan turun temurun sehingga menciptakan sikap pasif perempuan dalam partisipasi pada sebuah program atau kebijakan. Perlu adanya pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat meningkatkan kapasitasnya, bisa menyampaikan hak-hak dan aspirasinya, sehingga perempuan tidak tertinggal dalam pembangunan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Harahap, F. R., & Ramadhani, T. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Inklusif Berbasis Gender di Desa Munggu. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 219–234.
- Akter, S., Rutsaert, P., Luis, J., Me, N., Su, S., Raharjo, B., & Pustika, A. (2017). Women ' s empowerment and gender equity in agriculture : A different perspective from Southeast Asia. *Food Policy*, 69, 270–279. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.05.003>
- Aung, Y. M., Khor, L. Y., Tran, N., Shikuku, K. M., & Zeller, M. (2021). Technical efficiency of small-scale aquaculture in Myanmar: Does women's participation in decision-making matter? *Aquaculture Reports*, 21(July), 100841. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100841>
- Fajrina, D. R. N., Sunarti, N., & Nurwanda, A. (2024). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DI DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN. *Otonomi*, 1(September), 103–111. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi>

- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Budiman, A., Adilansyah, Muhamadong, & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 668–674. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502/http>
- Hariyanto. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 4(1).
- Herniti, E. (2013). GENDER DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Thaqāfiyyāt*, 14(12).
- Indarti, S. H. (2019). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1650>
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender and Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Kahsay, G. A., Nordén, A., & Bulte, E. (2021). Women participation in formal decision-making: Empirical evidence from participatory forest management in Ethiopia. *Global Environmental Change*, 70(August). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102363>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2023). *Resmikan Kampung Nelayan Modern di Biak, Jokowi Minta Pendampingan Berkesinambungan*.
- Maimuna, Y., Limbong, D., & Pracita, S. (2022). Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Pengembangan UMKM Berbasis Pengetahuan Khas Perempuan Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 399–416. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1114>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Nova, M. A. (2022). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa (Studi Femenisme dan Gender Pada Perempuan Desa Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-*

- Ukhwah*, I(1), 1–13.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/1126>
- Pramudya, F. R., Marsingga, P., & Purnamasari, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2129–2133.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3602/http>
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah. *PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Garudhawaca.
https://books.google.co.id/books?id=tDUtDQAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=truehttps://books.google.co.id/books?id=tDUtDQAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2%23v=onepage&q&f=truehttps://books.google.co.id/books?id=tDUtDQAAQBA
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/viewFile/3014/2750>
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 301–312. <https://www.neliti.com/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-des>
- Yakin, I. H. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Aksara Global Akademia* (Vol. 5). AKSARA GLOBAL AKADEMIA.